



Jangan Lupa Membawa KTP

Pencairan BLSM Tidak Bisa Diwakilkan

TAK BISA DIWAKILKAN

- Warga diminta membawa KTP dan KPS saat akan mencairkan BLSM
- Pengambilan BLSM harus dilakukan sendiri oleh pemegang KPS
- Untuk warga yang sakit, pengambilan bisa diwakilkan dengan menunjukkan surat rekomendasi dari kelurahan.
- Batas akhir pencairan BLSM sebenarnya sampai akhir Desember 2013.

YOGYA, TRIBUN - Pengambilan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) harus dilakukan sendiri oleh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Camat Gedongtengen, Antariksa Agus Purnama setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Kantor Pos Besar Yogyakarta, Jumat (21/6).

"Kecuali bagi warga yang berhalangan, misalnya sakit, bisa diwakilkan dengan menunjukkan surat rekomendasi dari lurah setempat," ucap Antariksa.

Di samping itu, setiap warga yang hendak mencairkan BLSM diminta membawa kartu identitas (KTP) dan KPS saat melaku-

Jangan Lupa Sambungan Hal 9

menerima daftar penerima *by name dan by adress*.

Lurah Sosromenduran, Hery Eko Prasetyo mengaku telah melakukan sosialisasi mekanisme pencairan BLSM tersebut melalui RT dan RW. Diharapkan seluruh pemegang KPS di Kecamatan Gedongtengen bisa mencairkan BLSM sesuai jadwal yakni Sabtu (22/6) dan Senin (24/6).

Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Besar Yogyakarta, Felix Firmiano telah menyiapkan enam petugas verifikasi dan empat petugas juru bayar yang akan melayani para pemegang KPS mencairkan dana BLSM mulai pukul 08.00 hingga 15.00. Para petugas akan mengecek data pemegang KPS secara rinci agar pencairan dana tersebut tidak salah sasaran.

Setiap pemegang akan menerima uang tunai Rp 300 ribu dalam pencairan BLSM tahap pertama tersebut. Total penerima BLSM di seluruh DIY sebanyak 288.391 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Terpisah, Lurah Sosromenduran, Hery Eko Prasetyo menjelaskan, hingga Jumat (21/6) belum menerima satu pun aduan dari masyarakat terkait penerima KPS yang tidak tepat sasaran. Pihaknya juga belum bisa melakukan pemantauan langsung ke masing-masing warga karena ia belum memiliki daftar penerima KPS, *by name dan by adress*.

"Kami belum tahu apakah ada penerima KPS yang sudah meninggal ataupun pindah domisili. Belum ada aduan juga dari masyarakat," ucap Hery.

Sejauh ini, pihaknya hanya menerima pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait mekanisme penggunaan dan fungsi KPS. Meski sempat menimbulkan kebingungan di tingkat wilayah, namun hal itu sudah bisa diantisipasi. "Kami sudah sosialisasikan ke warga. Mereka juga sudah banyak mendapatkan informasi dari berbagai media," imbuhnya.

Tercatat, jumlah penerima KPS di kelurahan Sosromenduran sebanyak 190 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau sekitar 2,5 persen dari total penduduk di Sosromenduran. "Tapi jangan dilihat persentasenya. Yang penting, tidak ada warga yang tercecer dari berbagai program perlindungan sosial, baik BLSM, Raskin, Jaminan Kesehatan dan lain sebagainya," pungkasnya. (esa/hdy)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen			
3. Kelurahan Sosromenduran			

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005